



# GUBERNUR PAPUA

Jayapura, 3 Desember 2020

Nomor : 188.3/20678/SET  
Lampiran : 1 (satu) berkas.  
Perihal : Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Papua Tahun 2021.

Kepada  
Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua

di -

JAYAPURA

Sesuai dengan ketentuan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Papua mengajukan Propemperda Provinsi Papua Tahun 2021, untuk dibahas dan disepakati bersama dan ditetapkan dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2021 (daftar Propemperda terlampir).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



**GUBERNUR PAPUA,**

**LUKAS ENEMBÉ, SIP, MH**

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua Badan Program Pembentukan Peraturan Daerah DPRP di Jayapura.

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2021

NO URUT	INSTANSI/SKPD PEMAKARSA	JENIS	TENJANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
					BARU	UBAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua	RAPERDASI	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	- Pendapatan Daerah. - Belanja Daerah. - Pembayaran Daerah.	Baru	-	- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	2021	
2	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua	RAPERDASI	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	- Pendapatan Daerah. - Belanja Daerah. - Pembayaran Daerah.	Baru	-	- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	2021	
3	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus SETDA Provinsi Papua.	RAPERDASI	Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kewenangan Kabupaten/Kota.	- Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan - Pembagian Kewenangan Pemerintah Provinsi Dengan Kabupaten/Kota - Pengalihan Asset - Penyelenggaraan Urusan Perlindungan dan Pemberdayaan Orang Asli Papua - Supervisi, Pengawasan dan Evaluasi	Baru	-	- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	2021	
4	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua	RAPERDASI	Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).	- Profil Wilayah (Letak Geografis, Administrasi, Kondisi Fisik, Oceanografi dan Gelombang Arus) - Kondisi Ekonomi dan Sosial Budaya. - Kondisi Sosial. - Kondisi Budaya. - Peta dan Ruang Lingkup Perencanaan.	Baru	-	- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. - Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan.	2021	
5	Badan KESBANGPOL Provinsi Papua.	RAPERDASUS	Pengawasan Sosial.	- Tujuan. - Bentuk Pengawasan. - Tata Cara Pengawasan. - Tindak Lanjut Pengawasan. - Tindak Lanjut Temuan.	Baru	-	- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	2021	
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi Papua.	RAPERDASI	Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Irian Bhakti Mandiri Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Irian Bhakti.	- Maksud dan Tujuan. - Perubahan Badan Hukum. - Nama dan Tempat Kedudukan. - Bidang Usaha. - Modal. - Saham-saham. - RUPS.	Baru	-	- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.	2021	



NO URUT	INSTANSI/SKPD PEMRAKARSA	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	TARGET	KETERANGAN
					BARU	UBAH		PENYAMPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua.	RAPERDASI	Pelaksanaan Tugas Kepolisian Di Bidang Keterliban dan Keterteraman.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tugas dan Tanggungjawab Kepolisian Daerah.</li> <li>- Penanganan Keterliban dan Keterteraman (Memperhatikan Kearifan Budaya, Pelaksanaan-nya Melibatkan Masyarakat).</li> <li>- Kewajiban (Menjamin Keterliban dan Keterteraman Kehidupan Masyarakat).</li> <li>- Peran Serta Masyarakat (Memelihara Keterliban dan Keterteraman Lingkungan).</li> <li>- Pengawasan Dilakukan Oleh KAPOLDA.</li> </ul>	Baru	-	- Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.	2021	
8	BPKAD Provinsi Papua.	RAPERDASI	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah.</li> <li>- Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan.</li> <li>- Penerimaan dan Penyaluran.</li> <li>- Penggunaan, Petausahaan dan Pemanfaatan.</li> <li>- Pengamanan dan Pemeliharaan.</li> </ul>	-	Ubah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah.</li> </ul>	2021	
9	BPKAD Provinsi Papua.	RAPERDASI	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang Lingkup.</li> <li>- Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.</li> <li>- Asas Umum dan Struktur APBD.</li> <li>- Penyusunan Rancangan APBD.</li> <li>- Penetapan APBD.</li> <li>- Pelaksanaan dan Petausahaan APBD.</li> <li>- Akuntansi Keuangan Daerah.</li> </ul>	-	Ubah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</li> </ul>	2021	
10	BAPPENDA Provinsi Papua.	RAPERDASI	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Objek dan Golongan Retribusi.</li> <li>- Retribusi Jasa Umum.</li> <li>- Retribusi Jasa Usaha.</li> <li>- Retribusi Pertanian Tertentu.</li> <li>- Wilayah Pemungutan dan Tata Cara Pemungutan.</li> <li>- Pendaftaran dan Pendataan.</li> </ul>	-	Ubah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> </ul>	2021	
11	Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua.	RAPERDASI	Keolahragaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang Lingkup dan Prinsip-Prinsip Dalam Penyelenggaraan.</li> <li>- Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan.</li> <li>- Kejayaan, Pekan, dan Festival Olahraga.</li> <li>- Sarana, Prasarana, Standartisasi, Akreditasi dan Sertifikasi</li> <li>- Koordinasi dan Pengawasan, Serta Peran Serta Masyarakat.</li> </ul>	Baru	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.</li> </ul>	2021	
12	Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua.	RAPERDASI	Keperemudaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah.</li> <li>- Peran, Tanggungjawab dan Hak Pemuda.</li> <li>- Perencanaan Keperemudaan.</li> <li>- Penyelenggaraan Pelayanan Keperemudaan.</li> <li>- Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Keperemudaan.</li> </ul>	Baru	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Keperemudaan.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</li> </ul>	2021	
13	BAPPENDA Provinsi Papua.	RAPERDASI	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.</li> <li>- Hibah.</li> <li>- Dana Darurat.</li> </ul>	Baru	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</li> </ul>	2021	

NO URUT	INSTANSI/SKPD PEMRAKARSA	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	TARGET	KETERANGAN
					BARU	UBAH		9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua.	RAPERDASI	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyederhanaan Perizinan Berusaha, Persyaratan Investasi.</li><li>- Ketenagakerjaan.</li><li>- Kemudahan dan Perlindungan UMKM.</li><li>- Kemudahan Berusaha.</li><li>- Dukungan Riset dan Inovasi.</li></ul>	Baru	-	<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</li><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</li></ul>	2021	
15	BAPEDA Provinsi Papua.	RAPERDASUS	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus.	Perincian Penggunaan Dana Tambahan Otonomi Khusus.	Baru	-	<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.</li><li>- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.</li><li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</li></ul>	2021	

